

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang dinyatakan relevan dengan penelitian yang saat ini diangkat oleh penulis tentang Badan Usaha Milik Desa yang menaungi Lumbung Stroberi pada Desa Pandanrejo sebagaimana dijelaskan dibawah.

Jurnal oleh Soedarso, Adi Suryani, Zainul Muhibbin, Moh Saifulloh tahun 2022, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dengan judul pada penelitian ini merupakan Dinamika Pengelolaan Ekowisata Lumbung Stroberi di Kota Batu Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat campuran dari metode survei lapangan dan kajian literatur, data penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis untuk disajikan menjadi hasil akhir penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa : pada masa new normal ini merubah seluruh kebiasaan untuk selalu menghargai kebersihan lingkungan sehingga ekowisata ini diterima masyarakat yang dianggap dapat menunjang Kesehatan masyarakat. Lumbung stroberi yang sempat mengalami kemunduran akibat tantangan berat akibat covid-19 mulai bangkit kembali dan berhasil melewati masa krisis dengan adanya Kerjasama antara pemerintah desa, perangkat BUMDes, pengelolaan sektor wisata, dan seluruh masyarakat (Soedarso et al., 2022)..

Jurnal oleh Tasya Galuh maharani, Drs. Sulismadi, M.Si, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan judul penelitian adalah Strategi Pengelolaan Agrowisata Lumbung Stroberi di Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode yang menggunakan observasi, wawancara dan teknologi. Dalam konteks sosiologi penelitian ini, hubungan industrial merupakan hubungan dua arah yang melibatkan hubungan antara pengelola dan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 pengelola strategi pengelolaan agrowisata stroberi, 10 laki-laki dan 3 perempuan, yang memenuhi setiap tanggung jawab yang diberikan. Program yang meliputi

penanaman, pendidikan dan pelatihan metode pengolahan produk dasar stroberi juga diselenggarakan. Mendukung strategi pengelolaan pariwisata diperlukan suatu sistem pengelolaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul. Model ini memiliki dua fitur utama yaitu manajemen tujuan dan manajemen produk. (Maharani & Sulismadi, 2023).

Jurnal oleh Windiani, Lienggar Rahadiantino, Eka Dian Savitri, Endang Susilowati, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dengan judul penelitian Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Kawasan Wisata Lumbung Stroberi-Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang mana seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian dan interpretasi pola dan kecenderungan mengenai kegiatan yang sedang berlangsung dianalisis. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi kelompok terfokus. Temuan penelitian ini memberikan penjelasan bahwa modal pada lembaga lokal, media sosial, dan hubungan masyarakat antar anggota berperan penting dalam mempromosikan Lumbung Stroberi sebagai destinasi wisata. Temuan penelitian ini juga menawarkan kontribusi ilmiah yang dapat dikembangkan dalam bidang penelitian pembangunan dari perspektif modal dalam pembangunan. (Windiani et al., 2022).

Jurnal yang ditulis oleh Asnah, Fedri Edo, Umi Rofiatin, Universitas Tribhuwana Tungadewi. Dengan judul penelitian Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raharjo Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan dilakukan menggunakan metode survey. Selain itu metode analisis data yang digunakan pada penelitian tersebut adalah deskriptif (kualitatif) yang juga diuji validitas data dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Raharjo dalam mengembangkan desa wisata dengan basis pertanian yang juga berperan penting. Dinilai dalam bidang pertanian dimana juga pendukung atas tercapainya dalam mengembangkan desa wisata, perekonomian warga yang bergerak dalam bidang pertanian ini sangat merasa terbantu dalam hal pemasaran

hasil panen buah stroberi, selain itu BUMDes Raharjo juga memiliki peran aktif pada peningkatan perekonomian masyarakat Pandanrejo, dapat meningkatkan aset desa, dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kesulitan mendapat pekerjaan karena faktor tertentu (Edo & Rofiatin, 2023).

Jurnal Internasional oleh Eva Desembrianita, Nirwanto Maruf, Tri Cicik Wijayanti, Zainul Wasik, dan Jumadi, Universitas Muhammadiyah Gresik. Dengan judul penelitian *The Implementation of the Sociopreneur Strategy in the Role of Raharjo Village Owned Enterprises (BUMDES) in the Development of the Strawberry Barn Tourist Village, Batu City*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa BUMDes telah menerapkan strategi pengelolaan desa wisata yang berbasis *sociopreneur* melalui usaha dalam bentuk pariwisata. Beberapa Langkah strategis serta inovasi telah dijalankan dengan cara : 1. Membangun jaringan antar pemangku kepentingan; 2. Membangun ikon desa wisata; 3. Pemantapan sistem perdagangan stroberi; 4. Memperluas akses pasar; 5. Pemasaran melalui media sosial; 6. Perluasan produk jasa pariwisata; 7. *Implementasi Sociopreneur*. Dengan kesimpulan, strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada menjadi modal sosial yang dapat disinergikan sebagai solusi dalam mengembangkan desa wisata stroberi (Desembrianita et al., 2021).

Jurnal oleh Rafi Alfiansyah dari Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Mengangkat judul penelitian *Peran Hubungan Industri Lumbung Stroberi dengan Petani Stroberi dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Pandanrejo*. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitian dengan jenis deskriptif, serta pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa melalui pertukaran sosial pada segi perindustrian menimbulkan dampak positif untuk kedua pihak. *Symbiosis mutualisme* dalam perindustrian ini seperti petani yang mendapatkan harga stabil, penghasilan yang terus meningkat yang dihasilkan dari olahan buah menjadi produk minuman sari buah stroberi serta memanfaatkan lahan untuk dialihkan menjadi

destinasi wisata petik stroberi yang juga berdampak pada perekonomian masyarakat yang meningkat (Alfiansyah, 2019).

Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian oleh Adrianus Bria, Ana Arifatus Sa'diyah, Anung Prasetyo Nugroho. Berasal dari Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Strawberry Di Agrowisata Petik Strawberry. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, selain itu pengolahan data diuji menggunakan triangulasi menggunakan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang dijalankan yang dinilai dapat memberikan perkembangan pada agrowisata petik stroberi yakni dengan pengoptimalan fasilitas serta meningkatkan daya pelayanan juga dengan mempromosikan destinasi wisata petik stroberi, melakukan reservasi produk dengan memanfaatkan lahan secara optimal, mengadakan paket wisata dengan rating harga tertentu, melakukan Kerjasama atau kolaborasi dengan agen perjalanan serta terus meningkatkan kualitas sumber daya Bersama agen travel dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Adrianus Bria, Ana Arifatus Sa'diyah, 2020).

Jurnal dari Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis oleh Restu Pamuji, Istis Baroh, dan Fithri Mufriantje. Berasal dari Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Judul penelitian berupa Analisis Bauran Pemasaran Buah Stroberi di "Lumbung Stroberi" Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan purposive sampling sebagai penentu responden. Dengan hasil dari penelitian yang mengungkapkan pemasaran lumbung stroberi masih mencakup kota kota kecil serta Sebagian pengiriman dilakukan ke Kota Surabaya, selain itu Lumbung Stroberi sudah menggunakan marketing campuran sebagai strategi yang menerapkan variabel 7P yakni product, price, place, promotion, people, packaging, process (Pramuji et al., 2023).

Jurnal oleh Alifinda Candy Wicaksono, Vi'in Ayu Pertiwi, dan Setiyo Yuli Handono. Berasal dari Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Mengangkat

judul Kepuasan dan Kepercayaan Pemuda terhadap Keberlangsungan BUMDes selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan *accidental sampling* sebagai penentuan sampel. Dalam menganalisis data menggunakan metode regresi linier sederhana juga uji parsial (uji T) menggunakan dukungan aplikasi yaitu SPSS. Hasil penelitian yang ditemukan adalah tingkat kepuasan pemuda secara parsial memiliki pengaruh pada rasa percaya pemuda kepada BUMDes Raharjo. Hasil penilaiannya yakni apabila kepuasan pemuda makin terpenuhi maka semakin besar pula tingkat kepercayaan pemuda. Tingkat kepuasan pemuda ini didapatkan dari dari pemberian besar gaji sesuai serta ketepatan waktu, adanya promosi dan jaminan naik jabatan, relasi sehat antar rekan kerja, serta tingkat higienis juga kenyamanan tempat kerja (Wicaksono et al., 2022).

Jurnal Sosial Humaniora oleh Deti Rahmawati, Soedarso, Arfan Fahmi berasal dari Departemen Studi Pembangunan, fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Dengan judul Analisis Pengembangan Desa Wisata untuk Keberlanjutan Petani Strawberry di Desa Wisata Pandanrejo Menggunakan Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan desain penelitian *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Analisa deskriptif dan eksploratif sebagai teknik analisis Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem PRA untuk pengembangan dan pembangunan Desa dapat ditinjau melalui prinsip yang dijabarkan, yaitu: adanya pertukaran pengalaman antar masyarakat, terlibatnya seluruh jaringan masyarakat untuk melakukan musyawarah serta diskusi kelompok, orientasi praktis tetapi masih mengecamkan kelangsungan strategi yang disusun. Pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, tingkatan ekonomi dapat memberikan pengaruh keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan untuk pembangunan. Selain itu metode PRA dapat meminimalisir hambatan sosial antara masyarakat dikarenakan masyarakat juga memiliki keterlibatan dalam penyusunan perencanaan untuk pembangunan (Rahmawati & Fahmi, 2023).

Jurnal Internasional dari Seminar Nasional Magister Agroteknologi oleh Vi'in Ayu Pertiwi, Destyana Ellingga, Deny Meitasari. Dengan judul Human

Resource Management of Agrotourism-based BUMDes (Township and Village Enterprise) on Rural Community Empowerment. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif serta menggunakan Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian mengemukakan tentang pengelola BUMDes yakni menerapkan sistem vakum sementara pada saat keluarnya kebijakan PPKM. Pada masa ini BUMDes tidak memberikan gaji pada karyawan namun hanya membagikan sembako untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang bekerja di BUMDes. Ini membuktikan bahwa BUMDes menjalankan pendekatan sistem sosial dan mengelola seluruh karyawannya agar dapat menjalankan fungsinya untuk menopang perekonomian seluruh masyarakat (Rahmawati & Fahmi, 2023).

Dari seluruh penelitian yang tertulis yang telah dilaksanakan tersebut, mayoritas penelitian terdahulu mengangkat tema strategi pengelolaan, peran BUMDes pada desa wisata, serta dinamika pengembangan Lumbung Stroberi, hal ini jauh kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini yang dimana peneliti akan mengkaji sebab BUMDes yang sempat tidak aktif pada tahun 2019-2020 serta terhubung dengan kelanjutan Lumbung stroberi pada saat itu dan menelisik perbandingan kejayaan BUMDes dengan Lumbung stroberi sebelum BUMDes non aktif dan setelah BUMDes kembali aktif.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Tata Kelola

A. Pengertian Tata Kelola

Secara harfiah, tata Kelola merupakan usaha sistematis pada proses tertentu dalam menggapai tujuan bersama pada suatu kelompok, dengan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi. Dengan ini, tata kelola memiliki maksud utama yakni untuk menjalankan manfaat, meminimalisir terjadinya resiko, dan pengoptimalan sumber daya (Zamzami et al., 2018).

Dengan ini visi misi diwajibkan membahas perencanaan masa depan. Tata kelola dapat digapai jika menguasai prinsip yang dapat membangun kepercayaan seperti akuntabilitas, efisien, efektif, memusat, kekeluargaan, keterlibatan, penegakan hukum, dan transparansi. Pada pemaparan tersebut maka disimpulkan bahwa tata kelola merupakan suatu

aktivitas yang dijalankan dengan struktur serta secara sistematis pada penyusunan, perencanaan, analisis, dan penetapan perencanaan supaya dapat menggapai tujuan yang telah disepakati.

Tata kelola ini akan dapat berjalan jika memiliki tempat kelompok yang mendukung, dapat mengembangkan inovasi serta regulasi yang relevan dari pemerintah. Selain itu budaya organisasi yang sehat juga mendukung berjalannya tata kelola yang baik, menetapkan fungsi manajemen yang sehat, dan dijalankan dengan saling berkaitan antar satu dengan yang lain, hingga mendapatkan kolaborator yang baik dengan pemerintah, swasta, atau seluruh aspek masyarakat.

B. Standar Tata Kelola

1. **Transparansi**, yakni kejelasan untuk menjalankan pengambilan keputusan serta kejelasan untuk mempresentasikan informasi yang aktual. Kejelasan untuk mempresentasikan kegiatan yang dijalankan hingga pihak luar seperti masyarakat pribumi, pelaku usaha, atau pemerintahan lain bisa memantau kegiatan yang sedang berjalan. Memberikan fasilitas informasi juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan informasi serta menggaet masyarakat untuk berpartisipasi. Transparansi ini memuat inklusifnya informasi, kesesuaian waktu, tersedianya informasi untuk masyarakat serta terjaminnya informasi yang menyebar.
2. **Partisipasi**, merupakan cara penyertaan *stakeholder* untuk penyusunan kebijakan. Berbagai macam saran dari seluruh pihak pada proses penyusunan kebijakan untuk mempertimbangkan seluruh permasalahan, sudut pandang, dan pilihan pengganti lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kegiatan partisipasi memberikan kesempatan untuk pembuat kebijakan untuk dapat belajar ilmu baru, mengaitkan keinginan publik pada proses pengembalian kebijakan serta meminimalisir peluang terjadinya permasalahan sosial. Indikator yang menjamin partisipasi yakni terjaminnya tempat formal dengan majelis yang bersangkutan, terdapat prosedur untuk menjamin partisipasi publik, proses yang

komprehensif serta terbuka, adanya masukan yang berasal dari publik yang akan diarahkan dalam Menyusun kebijakan.

3. Akuntabilitas, adalah transparansi kegunaan, struktur, sistem serta tanggung jawab anggota lembaga hingga dapat berjalan secara efektif yang dialankan oleh perencana kebijakan bersama *stakeholder*. Prosedur akuntabilitas memberikan peluang untuk *stakeholder* guna mendapatkan klarifikasi dan tanggung jawab jika ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kesepakatan.
4. Koordinasi, merupakan tahapan yang meyakinkan perkembangan pihak lain yang memiliki kepentingan , sesuatu hal yang berkaitan dengan program kerjanya.
5. Tanggung jawab adalah keselarasan pada kelola lembaga pada asas pengelolaan yang baik serta regulasi yang berlak.
6. Kemandirian adalah kondisi lembaga yang diatur dengan sempurna tanpa adanya tumbukan kepentingan dari manajemen yang tidak relevan dengan regulasi.
7. Kesetaraan dan kewajaran adalah perilaku yang adil dalam pemenuhan hak *stakeholder* yang tumbuh atas perjanjian dan regulasi (Noor & Rahmatllah, 2020).

C. Konsep Tata Kelola

Tata kelola dapat diibaratkan sebagai pemanfaatan sumber daya yang digunakan untuk menggapai tujuan yang diinginkan. Berbagai pengertian mengenai tata kelola organisasi, namun secara awam tata kelola merupakan cara untuk menyusun dan membimbing relasi antara pengelola dengan *stakeholder* kepada kelompok atau organisasi. Pada implementasinya, tata kelola memiliki kegunaan untuk mengelola cara, kebiasaan, regulasi, aturan, tentang lembaga yang memberikan pengaruh arahan, pengelolaan, dan kontrol pada institusi. Manajemen lembaga selalu terorganisir pada seluruh keterlibatan baik secara pengelola atau pengguna.

Tata kelola atau *Good Governance* merupakan rangkaian cara untuk kedua belah pihak sektor publik serta sektor swasta untuk mendapatkan persetujuan suatu keputusan. Tata kelola BUMDes meliputi prinsip

kooperatif, partisipatif, transparansi, dan akuntabel (Karinda et al., 2020). Pada pengelolaan BUMDes, *Good Governance* lebih difokuskan pada peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta keikutsertaan masyarakat desa (Sari, 2018). Tetapi, yang memiliki pengaruh besar terhadap tata kelola yang baik dalam struktur manajemen BUMDes atau khusus pada peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat desa adalah direktur BUMDes. Direktur BUMDes yang dapat menjalankan serta menerapkan *Good Governance* yang menuntun BUMDes agar lebih kompetitif serta memastikan BUMDes memiliki progresif yang signifikan. The UN Development Program (UNDP) tahun 1997 menyatakan terdapat 8 prinsip *Good Governance* yang meliputi: kesetaraan bagi partisipasi pada pembentukan kebijakan, Ketanggapan pada kebutuhan *stakeholder* (*responsiveness*), Kemampuan guna memediasi seluruh perbedaan bagi *stakeholder* untuk mencapai tujuan bersama, Akuntabilitas pada *stakeholder* yang menerima pelayanan, Transparansi pada proses penentuan kebijakan, Aktivitas yang berdasarkan pada kerangka hukum, Visi yang umum serta jangka Panjang untuk membentuk proses tata kelola yang terjamin atas lanjutan pada pembangunan sosial serta ekonomi, penjamin hak pada seluruh masyarakat guna mengembangkan taraf hidup dengan berbagai cara (UNDP, 1997).

D. Tujuan dan Prinsip Tata Kelola BUMDes

Tujuan dari tata kelola BUMDes yakni untuk memperbaiki struktur ekonomi serta kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah BUMDes dengan mengelola sumber daya alam desa serta melakukan inovasi usaha di desa. Prinsip tata kelola BUMDes meliputi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, pertanggungjawaban, serta berlanjut. Kooperatif yakni sikap kolaborasi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan serta keberlangsungan usaha (Yuliana & Alinsari, 2022).

2.2.2 *Grassroot*

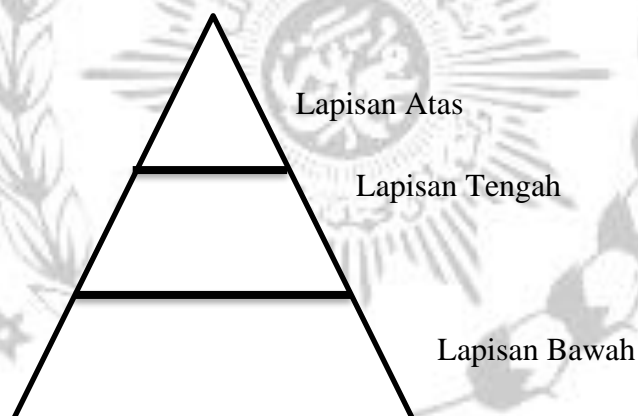
1. Pengertian *Grassroot*

Grassroot merupakan bagian dari stratifikasi sosial yang merupakan suatu teori yang terdapat pada sosiologi dengan memandang masyarakat

dengan perbedaan yang berdasar dengan status yang dimiliki. Status yang didapat pada seluruh masyarakat ini dapat digapai dengan usaha tertentu (*achievement status*) dan dengan tanpa usaha (*ascribed status*). Stratifikasi bermula dari kata *stratum* yang memiliki arti strata atau lapisan dalam yang bentuknya jamak (Aji, 2015).

Menurut Pitirim A. Sorokin dalam buku yang ditulis oleh (Soekanto, 2015) menyatakan bahwa sistem lapisan sosial adalah tanda yang khas pada seluruh kelompok masyarakat yang hidup dengan menjalankan aturan. Pakar filsafat yakni Aristoteles menyatakan bahwa seluruh negara memiliki tiga unsur klasifikasi kedudukan status manusia dalam bermasyarakat, yakni diantaranya masyarakat yang berstatus kaya sekali, masyarakat yang kurang mampu, dan masyarakat yang berstatus diantara kaya sekali dan kurang mampu atau tengah-tengah (Aji, 2015).

Apabila diumpakan dalam gambar, maka lapisan masyarakat dapat ibaratkan seperti dibawah ini:



Stratifikasi sosial adalah teori yang menjabarkan perbedaan atau cara mengelompokkan masyarakat pada kelompok sosial secara bertingkat. Seperti pada sebuah kelompok memiliki strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Penggolongan ini berdasarkan pada tanda-tanda tertentu yang dinilai berharga secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya atau matra lain pada kelompok. Tanda-tanda ini seperti materi atau kekayaan, tingkat pendidikan, jabatan, agama, serta pekerjaan (Aji, 2015).

Pembagian kelas merupakan kesetaraan dalam perihal ekonomi setiap manusia pada golongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi kemampuan dalam ekonomi pada tiap kelas maka semakin tinggi kelasnya dalam masyarakat. Kelas menengah kebawah atau kata lain dari *Grassroot* memiliki kemampuan yang terbatas dalam segi ekonomi yang seperti kelas atas. Dari hal ini membagi masyarakat pada tingkatan atau kelas-kelas sosial (Soekanto, 1993).

Sistem sosial merupakan sebuah jaringan yang strukturnya saling memiliki pengaruh secara deterministik (Brahmana & Si, 2003). Keselarasan pada sistem sosial berdasar pada pranata sosial, teori yang mengatur interaksi yang mampu berintegrasi pola perilaku serta komunikasi agar masyarakat dalam memiliki ketenangan dalam menjalankan hidup.

B. Unsur-unsur *Grassroot*

Terjadinya stratifikasi disebabkan oleh dua faktor, yakni: pertama; pada proses perkembangan masyarakat stratifikasi terjadi dengan sendirinya seperti tingkat kepandaian seseorang, senioritas, tingkatan usia, harta, serta lain sebagainya, kedua; terjadi karena disengaja untuk disusun berdasarkan tujuan bersama seperti sistem pangkat PNS, ABRI, feodal serta lain sebagainya (Aji, 2015).

Terjadinya perbedaan pada lapisan termasuk pada gejala universal yang juga menjadi pengaturan sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat mengetahui keberlanjutan dari proses lapisan kehidupan bermasyarakat maka dapat mengikuti pokok-pokok seperti berikut :

- Sistem lapisan, sistem ini berdiri atas sistem yang bertentangan pada masyarakat. Sistem ini memiliki arti yang khusus pada masyarakat tertentu untuk melakukan penelitian. Untuk menganalisis sistem lapisan pada beberapa arti seperti pada pendistribusian hak istimewa yang bersifat objektif contohnya jumlah penghasilan, tingkat kekayaan, kesehatan.

- Sistem tangga yang dibentuk oleh masyarakat (*prestise* dan penghargaan). Adapun tolok ukur dari sistem pertangga adalah sebagai berikut :
 - Kualitas individu, anggota kelompok tertentu, wewenang atau kekuasaan.
 - Tanda kedudukan, misal perilaku hidup, pakaian yang digunakan, perumahan, anggota pada suatu organisasi, dan lainnya.
 - Mudah atau sulitnya bertukar kedudukan.
 - Solidaritas yang dijalankan oleh setiap pribadi maupun kelompok yang juga memiliki kedudukan yang setara.
 - Bentuk-bentuk jaringan
 - Perbedaan sistem kepercayaan, sikap serta penilaian.
 - Kegiatan layaknya organ kolektif

Unsur-unsur dari stratifikasi sosial dibagi menjadi dua bagian yang dicabangkan lagi, yaitu :

- Kedudukan status
Kedudukan status merupakan status masyarakat dalam sebuah kelompok sosial. Kedudukan ini dibagi menjadi 3, yaitu (Aji, 2015):
 - *Ascribed status*, yakni status masyarakat di dalam sebuah golongan tanpa memperhatikan perbedaan dalam segi jiwa atau rohani serta tingkat kemampuan seseorang. Contohnya status yang diukur berdasarkan kasta. *Ascribed status* sering ditemui dalam masyarakat yang menganut sistem lapisan yang tertutup. Namun *Ascribed status* juga dapat dijumpai pada masyarakat yang menganut lapisan terbuka seperti kedudukan gender sebagai laki-laki pada keluarga yang kedudukannya jelas berbeda dengan perempuan baik istri maupun seorang anak, *Ascribed* yang dimasuk dalam hal ini, meskipun seorang laki-laki bukan keturunan bangswan atau darah biru namun dalam

keluarga seorang laki-laki akan menjadi kepala keluarga tanpa memerlukan status keturunan bangsawan.

- *Achieved status*, yakni status atau kedudukan yang dapat digapai dengan cara yang sengaja. Contohnya dalam hal pendidikan. Kedudukan ini tidak dapat diperoleh pada saat dilahirkan, namun kedudukan ini bersifat terbuka untuk seluruh masyarakat yang mampu dan memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan hingga mencapai tujuan yang diinginkan.
- *Assigned status*, yakni status yang dikhususkan dari masyarakat dengan persetujuan kepada salah satu tokoh masyarakat atau seseorang yang memiliki jasa tertentu. Namun status atau kedudukan ini terkadang diberikan kepada seseorang yang terhitung lama menjalankan sebuah jabatan tertentu yang sering dijumpai di area pedesaan atau dengan sebutan 'lurah hormat'. Status yang diberikan ini kepada lurah hormat ini biasanya akan mendapat julukan khusus seperti 'datuk' pada salah satu wilayah tertentu. Seseorang yang mendapat julukan khusus ini tidak memiliki beban akan tanggungan tertentu namun akan mendapatkan fasilitas tertentu yang diberikan oleh masyarakat yang tidak semua orang dapat mendapatkan akses yang sama.

Pada sebuah status juga tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang biasa disebut sebagai status konflik. Status konflik merupakan pertentangan oleh salah satu masyarakat yang saling memiliki status atau kedudukan. Status konflik ini terbagi menjadi dua kategori yakni status konflik individu dan antar individual (Gumilang, n.d.). Status konflik individual merupakan konflik yang dialami oleh diri sendiri seperti polisi yang sedang memberikan Tindakan tilang kepada kerabatnya. Sedangkan status konflik antar individu akan terjadi apabila terdapat dua orang yang akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami pada bidang yang sama.

– Peranan

Peranan adalah suatu dimensi pada saat seseorang tengah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan status dirinya. Disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kegiatan yang besar diharapkan oleh manusia lain pada seseorang yang tengah menduduki kedudukan tertentu. Menurut (Singgih, 2017), peranan melibatkan tiga hal yaitu :

- Peranan mencakup norma-norma yang memiliki koneksi dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat; pada bagian ini, peranan adalah kumpulan dari berbagai peraturan untuk mengontrol seseorang guna menjalankan kehidupan yang bermasyarakat;
- Peranan merupakan suatu teori tentang sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai masyarakat atau dalam organisasi;
- Peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk tatanan sosial.

Peranan juga memiliki berbagai sebutan untuk memberikan ilustrasi mengenai apa yang sedang terjadi, yakni:

- Model peranan, merupakan seseorang yang sebagai subjek
- *Prescribed role*, peranan yang didambakan oleh banyak masyarakat
- *Enacted role*, peranan yang aktual
- *Role distance*, biasa dikenal juga sebagai kesenjangan peranan yang merupakan kesenjangan antara kewajiban dengan tujuan peran
- Kegagalan peran, dapat terjadi akibat seseorang dalam bermasyarakat memiliki lebih dari satu peran yang dapat menimbulkan konflik yang bertentangan
- Konflik peran, akan terjadi apabila seseorang beranggoutakan ganda juga diwajibkan untuk menjalankan peranan yang beragam hingga mendapatkan hal yang tidak serasi.

2.2.3 *Economic Empowerment*

1. Pengertian Pemberdayaan

Bermula pada kata daya memiliki arti kekuatan, serta terjemah dari kata *empowerment*. Berasal dari kata dasar tersebut maka kata pemberdayaan memiliki pengertian usaha usaha yang dikhususkan pada kelompok dibawah garis kemiskinan, teruntuk kelompok yang kurang mampu memenuhi kebutuhan primer bagi kehidupan setiap hari (Hendrawati, 2018).

Dalam (Hendrawati, 2018) menurut Gunawan (2009) menerangkan bahwa pemberdayaan adalah aktivitas sosial yang dijalankan oleh organisasi dalam kehidupan bermasyarakat yang mengorganisasikan kelompoknya untuk merencanakan serta membuat tindakan kolektif untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan sosial serta untuk memenuhi kebutuhan sosial yang memanfaatkan sumber daya manusia digabungkan dengan sumber daya alam.

Menurut Suharto dalam (Hendrawati, 2018) pemberdayaan bertumpu pada kelemahan dalam setiap orang atau kelompok hingga diharapkan dapat :

- 1) Dapat memenuhi kebutuhan primer setiap individu hingga dapat merasakan bebas dari rasa lapar, kekurangan pendidikan hingga kesehatan yang terjamin
- 2) Peningkatan pendapatan serta mendapatkan bidang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan yang layak dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya
- 3) Ikut berperan dalam berbagai pengambilan keputusan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan setiap individu.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha guna memberikan kesadaran masyarakat untuk lebih respek atas dasar kesejahteraan dirinya sendiri sehingga muncul keinginan untuk menangani dan meningkatkan taraf hidup per individu (Alim, 2022). Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk usaha yang bersifat non konstruktif serta memberikan fasilitas untuk

meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana cara untuk memecahkan masalah menggunakan potensi yang ada beserta memanfaatkan fasilitas dari sektor instansi manapun (Alim, 2022). Menurut Chamber (1995) pemberdayaan adalah pemberdayaan ekonomi untuk menyusun sebuah paradigma di dalam pembangunan yang memiliki sifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Munawar, 2011).

Pengembangan pemberdayaan memiliki perubahan yang pesat sesuai dengan arus perkembangan zaman, menurut (Bahri, 2019) terdapat tiga aspek tumpuan untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan yaitu :

a) Aspek input

Pada aspek ini, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan memiliki empat bentuk pijakan yaitu sumber daya individu, sumber daya keluarga, sumber daya kelompok, serta sumber daya kelembagaan.

b) Aspek proses

Pada aspek ini, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan memiliki 4 kegiatan utama yaitu penguatan keterampilan (*skill*), perubahan sikap (*attitude*), peningkatan pengetahuan umum (*knowledge*), serta pengelolaan sumber daya yang ada.

c) Aspek output

Pada aspek ini, hal yang diharapkan pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yakni individu, keluarga, kelompok, serta lembaga yang juga berdaya.

C. Prinsip Pemberdayaan

Dalam (Bito et al., 2021) menurut Aswas terdapat beberapa prinsip untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi landasan bagi pelaksana atau penggerak dengan anggotanya sehingga pemberdayaan dapat mencapai tujuan bersama. Prinsip pemberdayaan yang dimaksud Aswas yakni:

1. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan demokratis serta ikhlas
2. Program dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada aspek kebutuhan masyarakat, permasalahan yang sedang dihadapi, dan sumber daya yang dimiliki. Dalam tahap ini perlu adanya identifikasi serta sosialisasi yang menggaet keikutsertaan masyarakat.
3. Memberikan masyarakat dalam posisi sebagai subjek dalam kegiatan pemberdayaan sehingga dapat menjadi basic awal untuk menemukan tujuan, pendekatan, serta bentuk kegiatan pemberdayaan yang sesuai.
4. Memberikan regenerasi modal sosial layaknya kearifan lokal yang terdapat pada poin poin budaya, tolong menolong, menghargai serta menghormati.
5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara berkala dan ber kelanjutan
6. Mempertimbangkan dan mengkaji berbagai tradisi yang menyebar di masyarakat
7. Mempertimbangkan unsur kehidupan sosial serta unsur ekonomi masyarakat
8. Menghindari diskriminasi pada perempuan
9. Menerapkan pendekatan partisipatif seperti mengkaji waktu, metode, materi, dan lainnya
10. Membangunkan keikutsertaan masyarakat dalam sesuatu yang berbentuk fisik dalam hal materi, tenaga, serta bahan dan dalam bentuk non fisik seperti dukungan, waktu, dan saran
11. Seorang yang mengorganisasikan pemberdayaan memiliki posisi fasilitator yang berkapabilitas pada kebutuhan serta masalah yang sedang melanda masyarakat dan ikut bekerjasama dengan instansi.

Namun dalam (Bahri, 2019) Hamid (2018) menyatakan terdapat sembilan prinsip pemberdayaan masyarakat, yakni :

1. Prinsip partisipasi

Pada bagian ini berartikan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam seluruh kegiatan pemberdayaan

2. Prinsip sustainable

Masyarakat diharuskan untuk melanjutkan dan mengembangkan hasil dari seluruh pemberdayaan agar menjadi program yang berkelanjutan

3. Prinsip demokratisasi

Masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat menentukan bentuk strategi dari pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing

4. Prinsip transparansi

Masyarakat dapat terlibat dalam persoalan keuangan agar lebih terbuka serta dipantau oleh seluruh elemen

5. Prinsip akuntabilitas

Pada pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

6. Prinsip desentralisasi

Pada bagian ini, segala bentuk peraturan tidak tersentralisasi kepada pemerintah, namun mengharuskan masyarakat untuk dapat melakukan perencanaan (*planning*), mampu membagi tugas (*organizing*), mampu melaksanakan (*actualing*), mampu melakukan pengawasan (*controlling*), serta mampu mengevaluasi (*evaluasi*).

